

ABSTRAK

Pada penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terhadap perlindungan perempuan dari KDRT. Penelitian ini akan melihat peran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda, kegiatan atau aksi nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan apa saja yang menjadi penghambat maupun tantangan bagi pemerintahan kota tasikmalaya ketika mengimplementasikan perda ini terhadap perlindungan perempuan dari KDRT. Metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana data-data akan dikumpulkan melalui wawancara beberapa lembaga kedinasan yang ada di Kota Tasikmalaya seperti, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Puspa dan Taman Jingga. Teori yang digunakan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye yang menjelaskan bahwasannya implementasi sangat penting dilakukan karena merupakan tahap krusial dimana keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diubah menjadi tindakan nyata oleh lembaga atau institusi yang bertugas menjalankannya. Untuk mengumpulkan data di penelitian ini dilakukan observasi secara mendalam, wawancara kepada mengumpulkan dokumentasi selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terlihat dari pembentukan UPTD PPA, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki karena sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan belum dilakukan secara maksimal, sehingga terdapat peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya. Tugas utama dari DP2KBP3A sendiri adalah melakukan pencegahan jangka panjang terhadap KDRT, namun sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A belum dilakukan secara maksimal. Sedangkan perlindungan korban KDRT dilakukan oleh UPTD PPA dibantu DP2KBP3A, Puspa dan Taman Jingga.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, KDRT, Peraturan daerah.

ABSTRACT

This study discusses the role of the Tasikmalaya City Government in implementing Regional Regulation Number 8 of 2015 on the protection of women from domestic violence. This study will look at the role of the government in implementing the Regional Regulation, activities or real actions that have been carried out by the government to realize the policy and what are the obstacles or challenges for the Tasikmalaya City Government when implementing this regional regulation on the protection of women from domestic violence. The method of this study is a qualitative method where data will be collected through interviews with several government agencies in Tasikmalaya City such as the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service (PPKbP3A), Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A), Puspa and Taman Jingga. The theory used uses the policy implementation theory from Thomas R. Dye which explains that implementation is very important because it is a crucial stage where decisions that have been made by the government are changed into real actions by the institutions or institutions tasked with implementing them. To collect data in this study, in-depth observations were carried out, interviews were conducted to collect documentation during this study. The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation number 8 of 2015 can be seen from the formation of the UPTD PPA, but there are still several things that need to be improved because socialization and education on violence prevention have not been carried out optimally, so that there is an increase in cases of violence every year. The primary task of the DP2KBP3A is to provide long-term prevention of domestic violence, but its outreach efforts have not been maximized. Meanwhile, protection for domestic violence victims is carried out by the UPTD PPA, assisted by DP2KBP3A Puspa and Taman Jingga.

Keywords: *Role of Government, Domestic Violence, Regional Regulations.*